

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

a. Pemberdayaan

1) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan gagasan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial untuk membangun pandangan dunia dengan kemajuan yang fokus pada wilayah lokal, yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Lebih dalam Chamber menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan menggunakan model penguatan wilayah tidak hanya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan penting namun lebih sebagai metode untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal secara selektif.

Menurut Maryani,dkk (2019) Pemberdayaan merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan suatu objek dapat menjadi berdaya atau memiliki daya. Menurut penjelasan-penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan masyarakat kekuatan atau daya sehingga masyarakat bisa mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi alternatif dalam pembangunan yang sudah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam implementasinya masih belum maksimal. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat sering kali sulit untuk dibedakan karena keterkaitan keduanya dimana dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan menjadi berdaya dan mandiri sehingga berpengaruh terhadap pembangunan.

Pemberdayaan dan pembangunan menjadi hal yang banyak dikaji oleh masyarakat karena berkesinambungan mengikuti kemajuan dan perubahan negeri ini. Nantinya, kemampuan membangun hubungan yang masih kurang akan sangat menghambat kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Yang dimaksud dengan perbaikan adalah perbaikan iklim lokal (Wijaya, 2015).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan proses perubahan yang terjadi di masyarakat secara terus-menerus untuk menjadi lebih baik. Dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah ditegaskan bahwa hal-hal pokok dalam peraturan ini adalah penguatan pemberdayaan, penciptaan dorongan dan imajinasi serta perluasan dukungan daerah.

Sesuai dengan rumusan kebijakan pemerintah di atas, disimpulkan bahwa pengaturan penguatan wilayah lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan provinsi menuju kemandirian.

2) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam gagasan perbaikan yang sudah begitu lama dilakukan oleh pemerintah, nampaknya justru berdampak pada tuntutan daerah yang mencakup pemerataan, keseimbangan, dan dukungan terhadap daerah, sehingga belum mempunyai pilihan untuk mencabutnya. bagian dari populasi yang sebenarnya hidup di bawah garis kehancuran. Melihat keadaan tersebut, penguatan daerah sebagai model perbaikan yang umumnya menjunjung tinggi individu menjadi sebuah jawaban, sehingga pemerintah memberikan strategi pemerintah yang berbeda:

- a) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN tahun 1999, khususnya dalam arah kebijakan pemajuan Daerah antara lain disebutkan, menumbuhkan kemandirian wilayah secara menyeluruh, segala sesuatunya seimbang dan penuh kesadaran dalam hal jaringan pendukung, lembaga moneter, landasan politik, landasan yang sah, yayasan yang tegas, organisasi adat, dan perkumpulan non-legislatif. serta segenap kemampuan masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Dalam Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Wilayah, antara lain disebutkan bahwa “hal-hal mendasar dalam peraturan ini adalah untuk mendukung penguatan daerah, menumbuhkan semangat dan imajinasi serta meningkatkan kerja sama daerah”.
- c) Dengan memperhatikan kedua rincian Strategi Pemerintah di atas, maka dapat disimpulkan dengan baik bahwa “strategi penguatan merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari strategi kemandirian daerah.
- d) Dalam Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pemajuan Masyarakat (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Peningkatan Wilayah (BAPPEDA) disebutkan bahwa maksud penguatan kawasan setempat adalah untuk meningkatkan penguatan kawasan setempat melalui penguatan instansi dan daerah sekitar. asosiasi

daerah, perlunya mitigasi dan jaminan sosial daerah, memperluas kemandirian daerah yang lebih luas untuk membantu daerah setempat dalam menggarap kehidupan moneter, sosial dan politiknya”.

- e) Untuk melaksanakan kewajiban di bidang penguatan daerah, Organisasi Penguatan Daerah memaparkan visi, misi, pengaturan, metodologi dan program penguatan daerah yang menyertainya: 1. Visi Penguatan Daerah adalah untuk meningkatkan otonomi daerah. 2. Misi Penguatan Daerah adalah untuk menumbuhkan kapasitas dan kebebasan secara terus menerus agar individu dapat membina diri dan keadaannya secara mandiri. Kebebasan masyarakat yang dimaksud adalah derajat kemajuan yang harus dicapai agar masyarakat dapat menciptakan dan menjaga keselarasan kehidupan berdasarkan kekuatannya sendiri secara terus menerus, dengan tujuan untuk membangun negara yang bebas dan perekonomian yang membumi. Dibutuhkan.

3) Tujuan pemberdayaan masyarakat

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan penguatan daerah dengan memperkuat lembaga dan perkumpulan daerah setempat, menaklukan kebutuhan dan memberikan jaminan sosial daerah, memperluas kemandirian yang luas untuk membantu jaringan dalam menggarap kehidupan ekonomi, sosial dan politiknya.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012) dalam hendrawati (2018), tujuan dari pemberdayaan meliputi berbagai upaya yaitu:

- a) Perbaikan pendidikan, dan ini berarti penguatan direncanakan sebagai tujuan pendidikan yang lebih baik. Peningkatan di bidang persekolahan dibantu melalui penguatan yang memiliki kemampuan beradaptasi dalam materi, strategi, situasi keseluruhan, serta hubungan antara pamong atau fasilitator dan penerima. Bagaimana pun, pengembangan lebih lanjut sekolah nonformal juga tidak kalah pentingnya dalam siklus penguatan yang dapat menumbuhkan kemauan untuk bersemangat dan keinginan untuk terus maju dalam Pendidikan sepanjang hayat.
- b) Perbaikan aksesibilitas, artinya seiring dengan berkembangnya jiwa realisasi jangka panjang, yang diharapkan dapat semakin mengembangkan ketersediaan, terutama

- ketersediaan yang dimaksud, yaitu akses terhadap data/kemajuan, sumber-sumber subsidi atau pembiayaan, pengaturan item, serta perangkat keras dan perusahaan periklanan.
- c) Perbaikan Tindakan, artinya dengan memberikan pengaturan yang lebih baik terhadap pengembangan pendidikan lebih lanjut dan tersedianya berbagai aset (baik SDM, aset normal maupun aset lain), maka diyakini akan ada sesuatu yang lebih baik.
 - d) Perbaikan kelembagaan, yang berarti bahwa berbagai latihan dianggap cocok untuk menggarap lembaga-lembaga kemasyarakatan, khususnya membina organisasi-organisasi setempat, sehingga dapat menjadi area kekuatan untuk situasi di masyarakat.
 - e) Peningkatan usaha, yang berarti pengembangan lebih lanjut pelatihan atau tenaga dalam latihan pembelajaran, pengembangan ketersediaan lebih lanjut, latihan dan peningkatan kelembagaan, yang diharapkan dapat terus menerus menggarap usaha-usaha yang dijalankan.
 - f) Perbaikan pendapatan, yang berarti semakin mengembangkan usaha yang dijalankan, dinilai mempunyai pilihan untuk lebih mengembangkan gaji yang didapat, khususnya untuk gaji diri sendiri dan keluarga secara keseluruhan untuk wilayah setempat.
 - g) Perbaikan lingkungan, dan hal ini berarti pengembangan lebih lanjut kesimpulan-kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi lingkungan, baik fisik maupun sosial, karena kemiskinan atau kemungkinan terbatasnya upah sering kali menyebabkan kerusakan pada lingkungan.
 - h) Perbaikan lingkungan, yang berarti tingkat upah yang memadai dan iklim yang layak, yang dianggap normal dalam bekerja sehari-hari di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar.
 - i) Perbaikan masyarakat, dan itu berarti lingkungan sehari-hari yang lebih baik di mata publik, serta bantuan dari iklim yang lebih baik dan lebih baik, dengan keinginan untuk memahami aktivitas publik yang lebih baik.

Menurut Margayaningsih (2018) pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan yaitu:

- a) Melahirkan pribadi setiap individu yang berkemampuan dan mandiri.

- b) Menciptakan lingkungan yang memiliki keinginan untuk bekerja dengan baik sehingga dapat menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan sesama anggota Masyarakat.
- c) Menciptakan masyarakat yang sadar akan potensi diri yang dimiliki bahkan peka terhadap potensi yang dimiliki di lingkungan sekitar.
- d) Melatih masyarakat agar dapat melakukan suatu planning terhadap Tindakan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya.
- e) Meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis serta dapat mencari sebuah solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berada di lingkungan sekitar.
- f) Memperkecil angka kemiskinan dalam masyarakat dengan melakukan peningkatan kemampuan dasar guna meningkatkan potensi yang ada atau dimiliki Masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Sulistiyani (2004), pemberdayaan mempunyai tujuan, khususnya untuk membentuk individu dan menjadi masyarakat yang lebih mandiri. Kemandirian ini meliputi aspek kebebasan berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang akan diselesaikan. Kemandirian harus terlihat dari suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang digambarkan dengan kemampuan berpikir, memilih dan mengambil keputusan terbaik secara cepat dan tegas dalam menangani suatu permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan daya/kapasitas yang tersedia saat ini.

4) Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat tidak hanya menekankan pada hasil yang dicapai tetapi memiliki beberapa proses-proses yang dilakukan dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang antusias, serta menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Masyarakat memiliki beragam perilaku dan sikap. Perilaku dan sikap tersebut memberikan pengaruh atas keberlangsungan dari pemberdayaan yang sedang dilakukan terhadap masyarakat sehingga metode dan strategi dalam melakukan pemberdayaan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dengan menggunakan metode yang tepat maka tujuan dari pemberdayaan akan terpenuhi.

Menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2017) merumuskan terdapat empat metode dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) Membangun relasi pertolongan yang mewujudkan pada bentuk: Mempertimbangkan reaksi keinginan untuk mewujudkan tujuan, mengenai keputusan tujuan yang

- ditentukan untuk menentukan nasib diri sendiri (kepercayaan diri), mengenai perbedaan satu sama lain serta mengetahui karakter individu yang berbeda, dan lebih jauh lagi memusatkan perhatian pada kerjasama. energi antara tandan yang satu dengan yang lainnya.
- b) Membangun sebuah komunitas yang kuat dengan berbentuk: memperhatikan dan menghargai individu-individu kelompok, keragaman karakter masyarakat yang dipikirkan, memusatkan perhatian pada individu-individu, dan umumnya menyembunyikan rahasia-rahasia yang dipegang oleh individu-individu dalam suatu kelompok.
 - c) Berhubungan dengan berpikir kritis dalam pemecahan masalah yang dapat diartikan sebagai: memperkuat kerja sama antar individu dalam proses berpikir kritis yang berbeda, mengenai keistimewaan individu dalam suatu pertemuan, mengikuti latihan sebagai pintu terbuka untuk belajar, dan selanjutnya mengikutsertakan individu dalam menentukan pilihan. pilihan bersama dengan dalam kegiatan evaluasi.
 - d) Mengemukakan sikap dan pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: disiplin dalam strategi kerja; terus dikaitkan dengan pergantian peristiwa profesional, wahyu dan penelitian strategi; mengikuti kesulitan individu dalam isu-isu yang luas, serta membuang semua jenis kesenjangan dan mengatasi masalah.

5) Proses Pemberdayaan

Menurut Suharto (2017) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:

- a) Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana dan iklim untuk memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang secara optimal. Membuat anggota masyarakat lebih mengetahui potensi yang ada pada diri maupun lingkungan sekitar dengan membebaskan sesuatu yang dapat menghambat dalam diri Masyarakat.
- b) Penguatan, yaitu dengan adanya penguatan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memecahkan masalah yang tengah dihadapinya. Sehingga masyarakat dapat berkembang dan percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki hal ini akan menunjang kemandirian Masyarakat.

- c) perlindungan, yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang, seperti perlindungan dari berbagai Lembaga eksternal dalam menunjang pemberdayaan yang dilakukan,. Hal ini akan mencegah terjadinya pemanfaatan oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.
- d) Penyokongan, yaitu adanya dukungan dan dorongan sehingga masyarakat dapat melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugas dan peranannya dalam masyarakat.
- e) Pemeliharaan, yaitu memelihara situasi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi dan kesempatan untuk berkontribusi sehingga setiap individu memiliki kesempatan dalam berusaha berusaha.
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam memadukan pertumbuhan dan pemerataan

Pemberdayaan yaitu konsep pembangunan ekonomi yang didalamnya meringkas nilai-nilai sosial dalam Pembangunan di masyarakat yang bersifat *People centered participatory, empowering and sustainable* (Chambers, 1995) dalam (Noor Munawar, 2011). Selain itu, hasil penelitian terhadap berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development (IPAD)* menunjukkan bahwa bantuan produksi yang diberikan oleh jaringan kelas bawah memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan dibandingkan dengan spekulasi yang dibuat di bidang yang lebih luas. Perkembangan selanjutnya tidak hanya berdampak pada biaya yang lebih rendah namun juga dengan jumlah perdagangan asing yang terbatas (Brown, 1995), yang menyiratkan bahwa dampaknya sangat besar bagi negara-negara yang berkembang dan mengalami kurangnya perdagangan asing dan keseimbangan perdagangan yang lemah. posisi neraca pembayaran.

Dalam kerangka ini upaya untuk memberdayakan masyarakat terdapat 3 aspek yang data dikaji:

- a) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana dan lingkungan yang memungkinkan terciptanya potensi daerah setempat secara ideal. Hal ini menyiratkan pemahaman bahwa setiap individu, setiap masyarakat umum mempunyai potensi yang dapat diciptakan tanpa ada individu atau masyarakat yang lemah. Penguatan merupakan upaya membangun dan membentengi kekuasaan dengan cara memberdayakan,

- mendorong dan meningkatkan keakraban individu terhadap kemampuan masyarakat serta upaya peningkatannya.
- b) *Empowering*, yaitu memperkuat kemampuan daerah setempat melalui latihan penguatan secara sungguh-sungguh yang memberikan akses berbeda dan membuka berbagai pintu terbuka yang menjadikan daerah setempat lebih berdaya. Upaya utama dalam penguatan ini adalah dengan meningkatkan tingkat pendidikan dan status kesejahteraan serta akses terhadap aset-aset yang menjadi alasan kemajuan finansial (modal, inovasi, data, pekerjaan, pasar) termasuk perbaikan fundamental perkantoran dan yayasan, untuk Misalnya, (sistem air, jalan). , pemerintahan, sekolah, lembaga kesejahteraan) yang hanya dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat paling minimal yang penguatannya sangat rendah. Oleh karena itu, proyek-proyek luar biasa diperlukan untuk tingkat masyarakat yang paling minimal, karena proyek-proyek umum yang berlaku untuk semua belum tentu selalu menyentuh kepentingan masyarakat pada tingkat tersebut.
- c) *Protecting*, yaitu mengamankan dan melindungi kepentingan kelompok yang tidak berdaya di mata publik. Meningkatkan kerjasama daerah dalam siklus dinamis yang melibatkan masyarakat dan jaringan mereka sangatlah penting, sehingga penguatan daerah erat kaitannya dengan pembelajaran, perkembangan dan pengalaman pemerintahan demokrasi (Friedmann, 1994). Pendekatan pemberdayaan pada dasarnya menekankan pada independensi pengambilan keputusan dari pertemuan-pertemuan lokal dengan mempertimbangkan aset-aset kekuasaan mayoritas dan pembelajaran sosial yang bersifat individu, langsung, dan demokratis. Dalam hal ini, Friedmann menegaskan penguatan lokal tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi saja tetapi juga bersifat strategis, sehingga pada akhirnya daerah akan memiliki posisi negosiasi (*bargaining position*) yang luas dan universal. Titik sentralnya adalah sudut pandang masyarakat, karena masyarakat umum akan merasa lebih mampu untuk terlibat dalam permasalahan yang ada disekitarnya.
- 7) Pendekatan metodologi dan Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat
- a) Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pengembangan fokus pada pemberdayaan wilayah lokal dicirikan sebagai arah perkembangan hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masyarakat, sehingga kegiatan yang efisien seharusnya berubah menjadi siklus yang

berkelanjutan, jelas teori ekonomi makro memerlukan mediasi tingkat yang tepat agar skala penuh strategi dapat menjunjung tinggi upaya untuk menghilangkan kekurangan. Eksekusi langsung terfokus pada lapisan masyarakat bawah, sehingga bersifat penguatan daerah. Model pengembangannya dapat menjadi metode menuju ide-ide kemajuan skala penuh dan miniatur. Cara mendasar untuk menghadapi gagasan penguatan adalah “masyarakat”. Bukan sebagai komponen proyek perbaikan, melainkan subjek dari kejadian-kejadian itu sendiri. Mengingat gagasan penguatan kawasan sebagai model perbaikan sesuai (Noor Munawar, 2011), metodologi yang digunakan harus mempertimbangkan:

Pertama, *targeted*, berarti usaha harus ditujukan kepada mereka yang tepat dan sesuai sasaran yang perihal masalah dan kebutuhannya dengan program untuk menyelesaikan masalah sesuai kebutuhannya.

Kedua, melibatkan dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang dijadikan sasaran. Tujuannya agar bantuan itu menjadi efektif karena sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam merencanakan, pelaksanaan, pengelolaan dan bertanggung jawab atas upaya tersebut. pengembangan diri dan perekonomiannya.

Ketiga, gunakan akses yang ada di kelompok karena secara individu masyarakat yang miskin sulit untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Selain itu partner bisnis antar kelompok dengan kelompok umum yang lebih baik menguntungkan dalam kemajuan kelompok. Selanjutnya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pendekatan holistik rasional dan berkelanjutan.

b) Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat

Lebih lanjut Noor menjelaskan mengenai mekanisme Pemberdayaan Masyarakat harus mencakup seluruh komponen masyarakat agar mempunyai pilihan untuk menumbuhkan potensi yang ada di mata masyarakat, beberapa fokus terkait adalah:

Pertama, tugas otoritas publik dalam pemerintahan harus mempunyai pilihan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan tersebut, mempunyai pilihan untuk membangun kerjasama daerah, membuka diskusi dengan daerah, membuat fokus administrasi dan mengelola sistem pasar yang dapat condong ke arah kepentingan umum. masyarakat

tingkat bawah. Kedua, perkumpulan kelompok masyarakat di luar iklim daerah setempat, perkumpulan non-legislatif, perkumpulan masyarakat dan lingkungan setempat. Ketiga, yayasan kelompok masyarakat yang berkembang dari dan di dalam wilayah setempat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dll. Keempat, koperasi sebagai wadah diskusi perekonomian perseorangan yang merupakan perkumpulan di bidang ekonomi dan jenis bisnis yang masuk akal bagi mayoritas moneter Indonesia yang mengatur pemerintah. Kelima, pendamping diperlukan karena masyarakat miskin pada umumnya memiliki keterbatasan dalam akses dan akses terhadap diri mereka sendiri serta kelompoknya. Keenam, pemberdayaan harus sesuai dengan tujuan dalam proses penataan perbaikan publik sebagai landasan proses. Ketujuh, asosiasi jaringan profesional tambahan, khususnya dunia bisnis dan rahasia.

8) Pemberdayaan Perempuan

a) Pengertian pemberdayaan Perempuan

Menurut Hubeis (2010) dalam Wildan Saugi dan Sumarno (2015, Hlm; 3) Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk mengusahakan peran perempuan dalam pekerjaan di negara dan bangsa, serta meningkatkan kualitas pada pekerjaan dan otonomi perkumpulan perempuan. Daulay (2006) dalam Wildan Saugi dan Sumarno (2015, hlm; 3) menyebutkan bahwa program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1978.

Pada perkembangannya, upaya untuk melibatkan perempuan ini tentu saja bertujuan untuk memperbaiki kondisi, derajat dan kehidupan pribadi perempuan di berbagai bidang utama, misalnya pendidikan, bisnis, masalah keuangan, kesejahteraan dan dukungan dalam pengaturan keluarga.. Menurut Budhy Novian dalam Khairul Azmi (2020; hlm 17) Pemberdayaan perempuan merupakan upaya yang memungkinkan perempuan memperoleh akses dan penguasaan atas aset-aset, keuangan, politik, sosial, sosial, sehingga perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan keberaniannya untuk dapat mengambil peran aktif dan ikut serta dalam menanggulangi permasalahan yang ada. tujuannya agar mereka dapat mengarang kapasitas dan ide-ide diri mereka.. Menurut Onny S. Pujono (1996) dalam Khairul Azmi (2020; hlm 18) pemberdayaan perempuan meliputi pemberdayaan psikologis, sosial budaya, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan erat karena terdapat jaringan kerjasama yang memberdayakan satu sama lain antar orang. Dimungkinkan untuk menciptakan transformasi, lingkungan sosial yang

tidak menindas dan memperbudak perempuan. Strategi pemberdayaan bisa melalui metode individu, kelompok atau organisasi, khususnya organisasi perempuan. Meskipun strategi pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki mengadopsi pendekatan dua arah, perempuan dan laki-laki yang saling menghormati sebagai manusia, 17 mendengarkan dan menghargai keinginan dan pendapat orang lain. Upaya kerja sama meliputi saling menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri individu, sehingga dapat menjadi manusia mandiri namun tetap memiliki individualitas

b) Tujuan dan Ciri Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan perempuan ialah untuk membangun akan kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga perempuan bisa mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Menurut Nugroho (2008), tujuan program pemberdayaan perempuan yaitu:

- (1) Meningkatkan potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk dapat terlibat diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- (2) Meningkatkan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Meningkatkan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan 18 kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.

Menurut Suharto (2003) Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- (1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- (2) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.

(3) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki. d. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan. e. Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye dalam pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

Pemberdayaan perempuan terdapat 2 ciri yaitu, pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam pembangunan, kedua, sebagai proses pelibatan diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi (Zakiah; 2010 hlm 12).

b. Pertanian dan Penyuluhan Pertanian

1) Pengertian pertanian

Menurut Purba dkk (2020, hlm 1-2) Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang dilakukan manusia untuk menghasilkan makanan, bahan baku modern, atau sumber energi, serta untuk menjaga iklim kehidupan mereka. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang diperuntukkan bagi agribisnis pada umumnya dirasakan oleh masyarakat sebagai pengembangan atau budidaya (*crop cultivation*) dan pemeliharaan hewan (*raising*), meskipun yang dimaksud juga dengan pemanfaatan mikroorganisme dan bio enzim dalam penanganan produk-produk unggulan. , seperti membuat keju cheddar dan tempe, atau sekadar ekstraksi sederhana, seperti memancing atau melakukan perdagangan ganda di hutan.

Menurut Muslim (2019) dalam Purba dkk (2020) terkait dengan pertanian, usaha tani (*farming*) adalah berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan (tanaman dan makhluk hidup). Petani adalah sebutan bagi individu yang menyelesaikan organisasi budidaya, misalnya “petani tembakau” atau “peternak ikan”. Khusus bagi pembudidaya hewan ternak (*livestock*) disebut dengan peternak. Para peneliti dan kelompok lain yang terkait dengan pengembangan teknik pertanian dan penerapannya juga dianggap terlibat dalam hortikultura. Hortikultura adalah cara paling umum untuk menghasilkan makanan, hewan, dan barang-barang agro-modern dengan menggunakan sumber daya tanaman dan hewan. Penggunaan aset-aset ini sebagian besar mengandung arti pembangunan (*cultivation*, atau untuk ternak: *raising*). Meskipun demikian,

terkadang apa yang dianggap sebagai bagian dari agribisnis bisa berarti ekstraksi sederhana, seperti penangkapan ikan atau penyalahgunaan lahan hutan (bukan agroforestri).

Menurut Mosher (1966) dalam Kurniawan dan Zuhriyati (2019) pertanian merupakan salah satu jenis kreasi yang bergantung pada siklus perkembangan tanaman dan makhluk hidup. Petani mengawasi dan memantau perkembangan tanaman dan hewan dalam suatu usaha budidaya, dimana kegiatan budidaya merupakan suatu usaha sehingga biaya dan upah menjadi hal yang sangat penting. Kemudian, secara umum, agar perbaikan agroindustri dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa pra-kebutuhan (*pre-necessities*), yang merupakan pra-kondisi bagi terjadinya perubahan tersebut. Jika mencermati apa yang diutarakan Mosher dalam tulisan teladan "*Getting Agriculture Going*", maka apa yang disiratkannya sebagai kondisi esensial dan bekerja dengan kondisi, merupakan salah satu kondisi penting bagi kemajuan agroindustri di Indonesia.

2) Pengertian Penyuluhan Pertanian

Menurut Subejo (2010), penyuluhan adalah suatu proses perubahan cara berperilaku di kalangan masyarakat setempat dengan tujuan agar mereka mengetahui, mau dan siap melakukan perubahan untuk mencapai perluasan penciptaan, upah atau manfaat dan bekerja atas bantuan pemerintahnya. Adapun menurut Febrianti (2018, hlm.5-6) Penyuluhan Pertanian merupakan program yang dijalankan pemerintah dalam rangka untuk turut mensukseskan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pertanian. Program penyuluhan pertanian cukup masif diterapkan pada orde baru dan terus dikembangkan oleh pemerintah sampai saat ini. Lebih lanjut Febrianti mengatakan, ekspansi hortikultura merupakan pengalaman yang berkembang bagi para petani dan pelaku bisnis sehingga mereka mau dan siap untuk bebas dan juga siap untuk berkoordinasi dalam menampilkan data, inovasi, modal dan berbagai aset.

Bagi pemerintah, penyuluhan pertanian merupakan suatu program yang melibatkan para petani dan keluarganya serta penggarap wilayah setempat melalui kegiatan-kegiatan non-formal di pedesaan agar mereka dapat bebas dan mempunyai kapasitas yang besar di bidang keuangan, sosial dan politik. Dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2006 tentang SP3K digambarkan bahwa kerangka pemekaran pertanian adalah keseluruhan rangkaian peningkatan kapasitas, informasi, kemampuan dan mental pelaku pergerakan pedesaan dan pelaku usaha melalui latihan pemekaran.

Menurut Amanah (2007, hal. 64-65) pada dasarnya, penyuluhan mencakup sekitar lima komponen, yaitu: (1) proses pembelajaran, (2) adanya subjek pembelajaran, (3) peningkatan kesadaran dan batasan diri dan kelompok, (4) pengelolaan sumber daya untuk mengembangkan kehidupan lebih lanjut, dan, (5) melaksanakan standar pengelolaan dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan melaksanakan kemampuan kelestarian lingkungan. Implikasinya, pelaksanaan penyuluhan harus mempertimbangkan kelima sudut pandang di atas.

Röling (1985) dan Oakley (1988) dalam Amanah (2007) menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dari *University of Wageningen*, Belanda di beberapa negara Afrika, penyuluhan harus mencakup lima kegiatan standar, yaitu layanan suplai input, layanan teknis, Pendidikan, organisasi dan penyadaran sehingga penyuluhan cocok untuk menambah kebutuhan dan berkontribusi pada kemiskinan. Hal yang paling umum adalah bahwa layanan penyuluhan terlalu terpusat pada pasokan input dan administrasi khusus, sementara masalah pendidikan, pengembangan organisasi dan penyadaran terlupakan.

Merdikanto (1993) dalam Agussabti (2018) menyebutkan bahwa penyuluhan sebagai suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan petani yaitu:

- a) Penyuluh pertanian sebagai upaya penyebaran data-data yang berkaitan dengan kemajuan pertanian, misalnya informasi dan inovasi yang bermanfaat dalam menciptakan kreasi pertanian baik kualitas maupun kuantitas. Meningkatkan kualitas dan kuantitas akan mempengaruhi peningkatan keseriusan produk dan peningkatan porsi industri secara keseluruhan yang pada akhirnya akan meningkatkan gaji para petani.
- b) Penyuluhan pertanian sebagai suatu kegiatan pemberian bekal oleh pendidik kepada para petani mengenai manfaat kegiatan di pedesaan, sehingga para petani benar-benar dapat memahami dan melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh guru secara praktis. Petani juga diharapkan dapat berpartisipasi secara efektif dalam menyelesaikan latihan augmentasi untuk menemukan solusi terbaik.
- c) Penyuluhan pertanian sebagai suatu proses perubahan perilaku yang menggabungkan informasi, perspektif dan kemampuan para petani dengan tujuan akhir membantu para petani dalam menggarap bantuan hidup pemerintah melalui usaha di bidang pertanian, memperluas hasil panen pedesaan, dan manfaat dari memamerkan hasil pertanian mereka. barang pertanian. Namun dalam siklus ini para

- petani harus memacu diri dan terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam menerapkan inovasi agraria yang berkaitan dengan kemajuan usaha budidaya sehingga nantinya para petani dapat mengembangkan usaha budidayanya secara mandiri.
- d) Penyuluhan pertanian sebagai siklus pendidikan yang erat hubungannya dengan perubahan perilaku dari masyarakat. Melalui pendidikan, para petani dapat mengevaluasi keuntungan dan kerugian dalam melakukan perubahan pada usaha pertaniannya untuk mengubah kualitas hidupnya.
- c. Kelompok Wanita Tani
- 1) Pengertian Kelompok Tani

Menurut Yusuf (1988) dalam Najib (2015, hlm 20) disebutkan bahwa kelompok adalah berbagai orang yang berkomunikasi satu sama lain secara dekat dan pribadi atau berkumpul. Setiap anggota berkomunikasi satu sama lain dan sepakat satu sama lain di antara individu-individu yang berkumpul. Sesuai Iskandar (1990) dalam Najib (2015, hal. 21) mengungkapkan arti dari kelompok adalah suatu kerangka yang mengkoordinasikan setidaknya dua individu, yang saling berhubungan dan dimana kerangka tersebut mempunyai kemampuan yang sama, mempunyai norma dan tujuan pekerjaan dalam hubungan tersebut. Individu juga memiliki kumpulan standar yang mengatur kapasitas kelompok dan setiap anggotanya.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelompok tani merupakan sekumpulan individu yang terdiri dari minimal dua orang atau lebih yang dibentuknya berdasarkan keinginan dan memiliki tujuan yang sama serta didalamnya terjadi interaksi-interaksi yang menunjukkan kebergantungan setiap anggota.

Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang terikat secara santai dan dibentuk berdasarkan persamaan, kepentingan, keadaan alam yang sebanding (sosial, keuangan, aset), kesamaan dan kesesuaian, serta memiliki kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok tani perlu mengenal mengenai pertanian yang baik, budidaya yang ideal dan keluarga petani yang sejahtera dalam peningkatan taraf hidupnya. Individu dipersiapkan untuk memiliki sudut pandang yang sama, minat yang sama dan didasarkan pada hubungan kekeluargaan. Dengan hadirnya pertemuan para petani, para petani dapat bekerja sama untuk mengatasi permasalahan yang mencakup penyediaan kantor produksi pertanian, produksi khusus, dan periklanan produk. Melihat potensi

tersebut, tandan petani juga harus dikembangkan dan diberdayakan agar dapat tumbuh dengan baik (Soekanto dan Soerjono, 2012).

Menurut Mardikanto (2009) dalam Lendo (2014) yang dimaksud dengan kelompok tani adalah kumpulan para tani atau petani yang terdiri dari para petani yang sudah dewasa (laki-laki/perempuan) dan petani yang masih dalam masa pelatihan, yang secara santai terikat dalam suatu wilayah berkumpul berdasarkan kesesuaian dan persyaratan normal serta berada dalam rentang kedudukan dan didorong oleh suatu kontak petani.

Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (2022) Kelompok Wanita Tani merupakan organisasi petani yang anggotanya terdiri dari kelompok perempuan yang terlibat dalam kegiatan pertanian. Berkumpulnya ibu-ibu petani sebagai persiapan untuk mempunyai usaha bermanfaat dalam skala keluarga yang memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang pertanian dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Sesuai dengan peraturan Menteri pertanian nomor 82 Tahun 2013 tentang aturan penyiapan kelembagaan bagi para pemulia dalam Effendy (2018:11) menyatakan bahwa tandan petani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang didirikan berdasarkan perbandingan kepentingan, kondisi alam yang sebanding (sosial, ekonomi, sumber daya) dan kesamaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan anggota.

2) Fungsi Kelompok Wanita Tani

Menurut peraturan Menteri pertanian nomor 82 tahun 2013 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani dalam Effendy (2018:11) menyatakan bahwa Kelompok tani adalah sekumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama, keadaan alam yang sebanding (sosial, ekonomi, sumber daya) dan kesamaan untuk meningkatkan dan membina organisasi individu.

Lebih lanjut dalam peraturan diatas membentangkan memiliki tiga fungsi dari kelompok tani yaitu:

- a) Kelas belajar, kelompok tani menjadi wadah belajar bagi anggota kelompoknya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta menjadikan anggotanya mandiri dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah maka menjadikan kehidupannya lebih sejahtera.

- b) Tempat Kerjasama, kelompok tani menjadikan tempat untuk memperkuat sinergi antara sesama petani dalam kelompok tani dan bahkan antar kelompok tani serta dengan pihak yang lain.
- c) Unit produksi, tandan petani harus dipandang sebagai satu unit spesialisasi yang dapat ditingkatkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dalam jumlah, kualitas dan keselarasan.

Adapun menurut Santosa (2004) menyatakan bahwa keberadaan Kelompok Tani memiliki fungsi:

- a) Kelompok tani sebagai tempat untuk bekerja sama.
 - b) Kelompok tani sebagai unit penciptaan.
 - c) Kelompok tani sebagai asosiasi aksi bersama.
 - d) Kelompok tani sebagai unit swadaya dan swadana.
 - e) Kelompok tani sebagai kelas pembelajaran, khususnya arisan pembelajaran bagi perkumpulan petani/individu untuk lebih mengembangkan informasi, kemampuan dan cara pandang serta menumbuhkan peningkatan kebebasan dalam bercocok tanam sehingga terjadi peningkatan efisiensi, peningkatan gaji dan kehidupan lebih sejahtera.
- 3) Komponen Kelompok Wanita Tani

Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (2022) Komponen Kelompok Wanita Tani terdiri dari tujuan terbentuknya KWT, syarat terbentuknya KWT, Proses Penumbuhan KWT, dan Pengembangan KWT yaitu:

- a) Tujuan Terbentuknya KWT

Tujuan dari dibentuknya KWT adalah sebagai upaya untuk mengikutsertakan perempuan dalam rangka meningkatkan efisiensi produk hasil pertanian serta dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan atas bantuan pemerintah dalam membina keluarga.

- b) Syarat Terbentuknya KWT

Kelompok Wanita Tani (KWT) terbentuk atas dasar adanya dua orang atau lebih kaum Wanita yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Jelas dalam menjadi keanggotaannya.
- (2) Memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok.

- (3) Adanya kesamaan tujuan dan target yang ingin dicapai.
- (4) Terdapat struktur organisasi yang jelas.
- (5) Ketergantungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan.
- (6) Satu kesatuan organisasi untuk mencapai tujuan dari kelompok secara bersama.

c) Proses Penumbuhan KWT

- (1) Dengan adanya sosialisasi.
- (2) Adanya pertemuan dengan para petani yang dihadiri oleh berbagai kalangan Masyarakat dan instansi terkait serta didampingi oleh penyuluh pertanian.
- (3) Menetapkan pengembangan KWT yang dituangkan dalam surat penjelasan disertai keterangan penyuluh pertanian.
- (4) Pengurus KWT terdiri atas Pengurus, Sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki.
- (5) Setiap KWT harus terdaftar pada satuan kerja yang melakukan usaha pemekaran di Daerah dan informasinya dimasukkan ke dalam Kerangka data manajemen penyuluh pertanian.

d) Pengembangan KWT

Dalam mengembangkan kemampuan dan kemandirian para perempuan untuk lebih mengembangkan sektor pertanian dan budidaya agrobisnis, KWT menjadi bidang kekuatan bagi perkumpulan petani yang berpengetahuan dan mandiri dengan ciri-ciri::

- (1) Melakukan pertemuan secara rutin dan berkelanjutan.
- (2) Mempunyai perencanaan kerja kelompok yang disusun bersama-sama mengingat kesepahaman.
- (3) Memiliki peraturan dengan mengambil keputusan yang telah disepakati dan dipatuhi.
- (4) Memiliki catatan atau organisasi.
- (5) Sebagai sumber data mekanis bagi individu-individunya.
- (6) Adanya usaha yang dilakukan oleh perseorangannya.
- (7) Adanya kerjasama antar individu dan antar kelompok serta partisipasi dengan kelompok yang berbeda.
- (8) Adanya penambahan modal usaha yang berasal dari sebagian komitmen atau disisihkan dari kumpulan hasil usaha.

d. Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S)

1) Pengertian P4S

Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) adalah usaha atau organisasi pelatihan dalam bidang pertanian di pedesaan yang didirikan, dimiliki dan diawasi oleh para petani, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, dan secara langsung berperan dalam perbaikan pedesaan melalui peningkatan SDM pertanian melalui pelatihan/pemagangan. untuk pertanian dan Masyarakat di lingkungannya.

Pembinaan P4S direncanakan sebagai upaya untuk membangun batasan P4S dalam memilah serta melakukan penyiapan/pemagangan bagi para petani dan jaringan desa. Peningkatan P4S dilakukan antara lain melalui penyiapan pengarahan dari segi kelembagaan, yayasan, ketenagakerjaan, koordinator persiapan/jabatan sementara, dunia usaha dan organisasi kerja. Pemerintah menyelesaikan kegiatan pembinaan P4S, untuk menghimbau pimpinan P4S agar juga konsisten menggarap sifat pelatihan/magang, sehingga P4S dapat menjadi pusat pendidikan pedesaan yang berkualitas. Dengan memiliki tujuan:

- a) Meningkatkan batas kemampuan Kepala P4S Galih Jaya dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan pekerjaan persiapan/semntara.
- b) Pengerjaan yang bersifat penyiapan/magang yang dilakukan oleh yayasan persiapan agraria swadaya.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 03/Permentan/PP.410/I/2010 tentang Pedoman pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya di dalamnya belum mewajibkan pendekatan baru dalam kaitannya dengan penguatan petani dan dinamika dinamika perputaran alam. Peraturan Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, Perikanan dan kehutanan mempunyai jiwa partisipatif dengan memberdayakan kontribusi daerah setempat untuk mengambil bagian selama waktu yang dihabiskan untuk mengaktifkan jaringan budidaya. Begitu pula dengan Peraturan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani, disebutkan bahwa penjaminan dan penguatan petani dapat mencakup berbagai pihak, baik pemerintah, daerah rahasia, maupun daerah sesuai dengan kebijaksanaan masyarakat.

Dalam Pedoman Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya ini yang dimaksud dengan:

- a) Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya yang selanjutnya disebut P4S merupakan organisasi penyiapan dengan strategi pemagangan pertanian dan provinsi yang didirikan, dituntut dan diawasi oleh pelaku utama dan pelaku usaha secara bebas, baik orang maupun kelompok.
- b) Pelaku utama adalah warga penduduk Indonesia beserta keluarganya yang melakukan budidaya di bidang tanaman pangan, pertanian, perkebunan serta peternakan.
- c) Pelaku usaha adalah perseorangan penduduk Indonesia atau perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan Indonesia yang membawahi organisasi pedesaan.
- d) Pengelola kelembagaan pelatihan pertanian swadaya adalah orang perseorangan atau perkumpulan yang mengusulkan pengaturan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penyiapan dan pemagangan bagi Penghibur Dasar serta Penghibur Usaha atau daerah setempat.
- e) Asosiasi kelembagaan pelatihan pertanian swadaya merupakan wadah diskusi dalam acara sosial untuk lebih mengembangkan korespondensi dan memperjuangkan tujuan dari setiap individu-individunya.
- f) Pembina kelembagaan pelatihan pertanian swadaya adalah lembaga yang melakukan upaya untuk melibatkan pemberdayaan, baik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- g) Klasifikasi adalah pengakuan status tingkat/kelas kelembagaan pelatihan pertanian swadaya yang dilakukan melalui siklus penilaian berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- h) Standarisasi merupakan landasan model standar yang harus ada dan dilaksanakan pada setiap mata kelas dari kelembagaan pelatihan pertanian swadaya.
- i) Sertifikasi adalah pengakuan terhadap adanya kelembagaan Pelatihan pertanian Swadaya yang dapat melakukan pembinaan unit petani, pelatihan/pemagangan dan latihan pemekaran desa, yang diberikan sebagai pengesahan.
- j) Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyaring perkembangan dan perbaikan kelembagaan, keterkaitan dan pelaksanaan persiapan

dan pemagangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga arahan tambahan dan permasalahan yang diperhatikan pada setiap tahap.

- k) Evaluasi adalah serangkaian latihan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan dan produktivitas kehadiran kelembagaan dan pelaksanaan latihan persiapan dan pemagangan bagi Penghibur Utama atau calon Penghibur Usaha di Tempat Persiapan Hortikultura Gratis.

2) Prinsip, ciri dan Peran P4S

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang pedoman Pembinaan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya ada beberapa prinsip, ciri dan peran P4S yaitu:

a) Prinsip Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya:

- (1) Keswadayaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dikembangkan untuk dapat menambah pengetahuan serta kemampuan, peran dan kemandirian dari kelembagaan dengan adanya kompetensi dalam mengatasi permasalahan.
- (2) Keterpaduan Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan aspek penting Pembangunan dalam bidang pertanian di pedesaan secara teratur dan bersinergi.
- (3) Kemitraan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya merupakan partner Kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia dalam sektor pertanian.
- (4) Kemanfaatan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya memberikan manfaat terhadap Masyarakat pertanian.
- (5) Berkelanjutan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan.

b) Ciri Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya:

- (1) Memiliki jiwa yang kuat serta unggul dalam melakukan usaha pertanian di pedesaan dan memberikan pengetahuan, teknologi dan keterampilan secara sukarela demi kepentingan dan kemajuan dalam bidang pertanian.
- (2) Memiliki lahan untuk pertanian dalam rangka berusaha tani.
- (3) Membantu dan melayani Masyarakat dalam melakukan pertanian dengan melatih, bermagang, dan berkonsultasi.

- (4) Senantiasa terus berada pada wilayah atau lingkungan usaha tani di pedesaan yang menunjang proses pembelajaran dan mengajarkan pada petani lainnya.
 - (5) Memiliki instruktur/pelatih, fasilitator lainnya yang profesional.
- c) Peran Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya sebagai:
- (1) Lembaga penyelenggara pelatihan dan permagangan untuk Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain.
 - (2) Lembaga yang turut andil dalam penyelenggaraan penyuluhan dan pendampingan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha lain.
 - (3) Lembaga yang turut menumbuhkan, mengembangkan dan memperkuat kader tani. Sentra dalam pengembangan dan diseminasi teknologi/inovasi, budidaya, perbenihan, pengolahan hasil, pengembangan spesifik lokalita; dan Sentra pengembangan jejaring Usaha Tani.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dan dijadikan referensi dengan penelitian ini antara lain:

a. penelitian yang pertama

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Silvy Devita tahun 2022 dengan judul “Pemberdayaan kelompok taruna tani melalui budidaya tanaman hortikultura untuk meningkatkan produktivitas pemuda (Studi pada Kelompok Taruna Tani Bakti di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan dapat membantu dalam meningkatkan keproduktifitasan pemuda di daerah tersebut, dengan adanya pemberdayaan ini selain membantu selain membantu pemuda produktif juga membantu taruna tani dalam segi perekonomian menjadi lebih baik dan meningkat. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti yaitu terletak pada pemberdayaan terhadap petani dengan memberikan daya kepada petani dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan.

Perbedaannya penelitian yang saya lakukan sarasanya terhadap ibu-ibu kelompok tani tau dapat disebut juga Kelompok Wanita Tani.

b. penelitian yang kedua

Penelitian yang dilakukan oleh Ending Warih Minarai, Darini Sri Utami dan Nur Prihatiningsih dengan judul “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran rendah berbasis Kearifan lokal dan Berkelanjutan” penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersikap deskriptif dan metode yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan analisis data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kelompok Wanita Tani merupakan usaha dan wadah bagi kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan keterampilan dari kegiatan pelatihan dengan memberikan Pendidikan kepada Kelompok Wanita Tani, sehingga Kelompok Wanita Tani menjadi mampu untuk dapat memanfaatkan keterampilan yang telah diberikan oleh penyuluh. Pelatihan yang diberikan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga Kelompok Wanita Tani menjadi mandiri.

c. Penelitian yang ketiga

Penelitian yang dilakukan oleh Asriyanti Syarif dengan judul Pemberdayaan Perempuan menghadapi Modernisasi Pertanian Melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) pada usaha tani Sayuran di Kecamatan Bissapu kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan, kemudian menjelaskan. Serta menggunakan Teknik Purposive Sampling dengan memilih 6 orang sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi Langsung dan wawancara berfokus pada pemberdayaan perempuan yang meliputi: bentuk pemberdayaan, tingkat partisipasi, dan program-program yang ditawarkan. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberdayaan yaitu perubahan perilaku, peningkatan wawasan, peningkatan kerjasama, dan peningkatan peran dari perempuan.

Dari penelitian diatas maka Pemberdayaan Perempuan menghadapi Modernisasi Pertanian melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) pada usaha tani Sayuran di Kecamatan Bissapu kabupaten Bantaeng sangat berpengaruh terhadap keberdayaan petani terutama perempuan tani. untuk informan dalam penelitian ini menggunakan

Teknik *purposive sampling* dimana informan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan, yaitu dari berbagai warga desa dan Lembaga yang terkait.

d. Penelitian yang keempat

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Kusuma Yuei Citra, dan Yusuf Adam Hilman dengan judul “pemberdayaan perempuan melalui kelompok wanita tani di desa karangpatihan kecamatan pulung kabupaten ponorogo”. Penelitian ini dilakukan pada Kelompok Wanita Tani Citra Lestari di Desa Karangpahitan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo menggunakan metode kualitatif dan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi untuk informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* dimana informan dalam penelitian ini berjumlah 13 informan, yaitu dari berbagai warga desa dan Lembaga yang terkait.

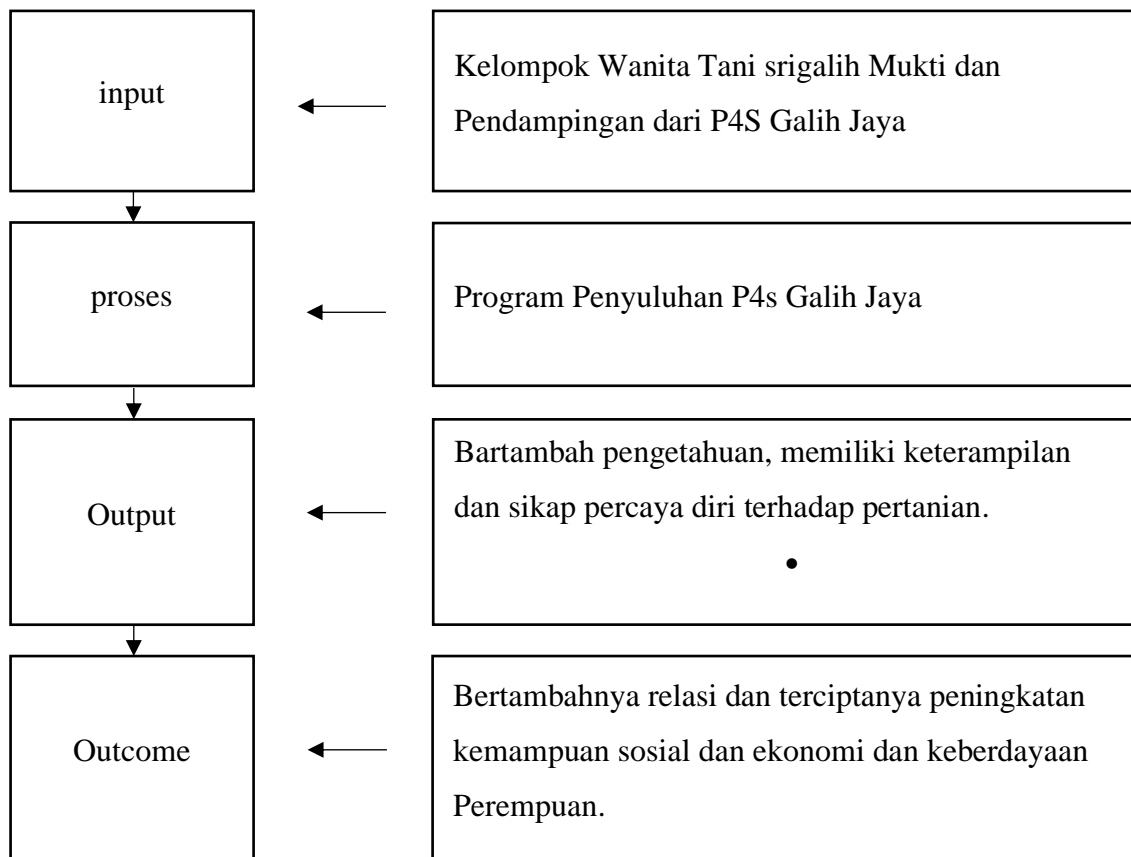
Kegiatan memberdayakan Perempuan melalui Kelompok Wanita Tani ini merupakan program penguatan bagi para petani perempuan agar dapat menumbuhkan peluang di bidang hortikultura sekaligus memperluas wawasan dan membekali para petani perempuan dengan watak dan jiwa yang *mindful*.

e. penelitian yang kelima

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Saepul Alam, Ahmad Nur Rizal, dan Moh Dian Tresnawan dengan judul “peran pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya (p4s) dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan (Studi kasus di P4S Tani Mandiri Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat)” tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan memberikan pertanyaan sebelum dan sesudah melakukan program P4S. Berdasarkan hasil analisis penelitian ini lebih merujuk kepada program Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) yang berperan sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan para petani. Sehingga para petani menjadi lebih mampu dalam melakukan pertanian. Para peserta sebelum melaksanakan kegiatan ;pelatihan melalui P4S memiliki jumlah skor 1183 dan setelah melaksanakan pelatihan jumlah skor menjadi 1482.

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan swadaya sangat berperan dalam memberdayakan para petani.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pendampingan melalui Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) merupakan salah satu program Penyuluhan untuk memberdayakan petani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Sasaran dalam program ini yakni Kelompok Wanita Tani Sri Galih Mukti. Program penyuluhan Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) memberikan berbagai bentuk penyuluhan berupa pelatihan dan pendampingan mengenai pengelolaan lahan pertanian yang dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian. Melalui kegiatan ini diharapkan Berdayanya Kelompok Wanita Tani Sri Galih Mukti dalam upaya meningkatkan kemampuan sosial dan ekonomi.

Kerangka diatas mendeskripsikan bahwa KWT Sri Galih Mukti sebagai sasaran dalam kegiatan Pemberdayaan melalui pendampingan melalui Program dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S). Program-program yang dilakukan oleh

Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) menjadi proses berjalannya kegiatan pemberdayaan ini, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan ini Kelompok Wanita Tani Sri Galih Mukti dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dan rasa percaya diri dalam bidang Pertanian. Outcome dalam kegiatan ini diharapkan dapat terciptanya peningkatan kemampuan sosial dan ekonomi dan berdayanya Kelompok Wanita Tani Sri Galih Mukti. Dengan Kerangka Berpikir ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami isi dan makna dari penelitian ini.

2.4 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sriglih Mukti melalui Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Galih jaya di kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya?